



LAPORAN KINERJA BPTP ACEH



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2022**

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH TAHUN 2022



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan aplikasi konsep akuntabilitas dalam wujud kewajiban setiap pemimpin instansi pemerintah mempertanggung-jawabkan kinerjanya pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan kepada atasan langsung yang bersangkutan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdayaguna, bertanggung jawab dan bebas KKN dapat dicapai dengan menerapkan suatu sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan nyata. Melalui Inpres Nomor 7 tahun 1999 keputusan kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99, dan ditegaskan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan konsep akuntabilitas sebagai salah satu indikator kinerja birokrasi publik.

Penyusunan LAKIN ini melibatkan berbagai pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu diucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan. Pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah merupakan siklus yang terus bergerak dan selalu mengikuti perubahan yang ada dalam organisasi, maka diperlukan saran dan kritikan guna penyempurnaan laporan LAKIN ini pada masa depan.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPTP Aceh Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance*.

Banda Aceh, 5 Januari 2023

Kepala BPTP Aceh



Ir. M. Ferizal, M.Sc
NIP. 19650219 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja (Satker) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai gambaran aktual dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Aceh berpegang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017, dimana tugas dan fungsi BPTP Aceh adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sedangkan Program yang dilaksanakan adalah Penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan.

Sesuai dengan Renstra BPTP Aceh tahun 2020-2024, pada tahun 2022 BPTP Aceh mengimplementasikan program utama Badan Litbang Pertanian yaitu "Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-industri Berkelanjutan" melalui Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2022 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **>100 persen** dengan kategori **sangat berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPTP Aceh telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bahkan melebihi target sasaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, BPTP Aceh telah melakukan revisi anggaran tujuh kali selama tahun 2022. DIPA Pagu yang awalnya sebesar Rp.14.109.942.000,- setelah revisi kesembilan yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp.8.559.474.000,-. Dalam perjalanannya mengalami revisi yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: Pergeseran dan Pengalokasian Anggaran dan Penambahan Alokasi Anggaran PEN. Realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan data PMK 249/2011, E Sakip Pertanian dan E Monev Bappenas sebesar Rp. **8.417.724.432,- (97,89 persen)**.

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2022 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan pengkajian dan diseminasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh BPTP Aceh terutama berkaitan dengan terbatasnya kualitas SDM terutama pada kualifikasi dan bidang keahlian. Selain itu, perimbangan komposisi peneliti dengan penyuluh belum sesuai kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BPTP Aceh berkaitan dengan respon pemerintah daerah dalam membantu dan mendukung teknologi yang didesiminasikan di daerah, selain itu terbatasnya sumber pendanaan untuk memperluas jejaring kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi antar instansi mulai dari perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) hingga instansi terkait sehingga perwujudan diseminasi *multi chanel* belum maksimal di lapangan.

Kata Kunci: LAKIN, Renstra, Capaian Kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan dan Sasaran	6
2.4. Kegiatan	8
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja	13
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun TA. 2022 dengan Target Renstra 2020-2024	20
3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	21
3.2. Akuntabilitas Keuangan	22
3.2.1. Realisasi Keuangan	22
3.2.2. Pengelolaan PNB	24
IV. PENUTUP	26
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	26
4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	26
V. LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HAL
1	Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi BPTP Aceh Tahun 2022	10
2	Perjanjian Kinerja BPTP Aceh Tahun 2022	11
3	Revisi Anggaran BPTP Aceh Tahun 2022	11
4	Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2022	12
5	Pengukuran Kinerja BPTP Aceh Tahun 2022	14
6	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi	15
7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan	16
8	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Paket Teknologi Pertanian yang Dihasilkan Terhadap Pengkajian Teknologi Pertanian yang Dilakukan Pada Tahun Berjalan Kinerja	18
9	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	19
10	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi	20
11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPTP Aceh Tahun 2022	23
12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2022	24
13	Realisasi PNPB BPTP Aceh Tahun 2022	25

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HAL
1	Struktur Organisasi, Personalia, dan Tata Kelola BPTP Aceh Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh Nomor: B-01/OT.220/H.12.I/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022	28
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
3	Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih BPTP Aceh Tahun 2022	31
4	Dokumentasi Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2022	35

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2022 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPTP Aceh tahun 2022 merupakan LAKIN tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. LAKIN BPTP Aceh yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian, Permenpan dan RB No 53 tahun 2014, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No 40/2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL, PMK 29 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran KL, Permentan No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja, (2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas

pengukuran, dan implementasi pengukuran, (3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%) yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya serta (5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan. Nilai dari evaluasi LAKIN adalah AA (sangat memuaskan) skor > 90–100, A (memuaskan) skor 80–90, BB (sangat baik) skor 70–80, B (baik) skor 60 – 70), CC (memadai) skor 50–60, C (kurang) skor >30–50, dan nilai D (sangat kurang) skor 0–30.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengkajian menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu reviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi

dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh merupakan salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, BPTP Aceh adalah unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Provinsi Aceh yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) di Bogor. Struktur organisasi dan tata kerja BPTP Aceh dengan penetapan jabatan struktural. Berdasarkan Permentan tersebut, BPTP Aceh memiliki dua Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP), yaitu IP2TP Paya Gajah dan IP2TP Gayo. Sesuai dengan Permentan tersebut juga, Tusi BPTP adalah adalah (1) melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian daerah, (2) Pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, (3) serta pengembangan teknologi pertanian dan diseminasi. Selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPTP tersebut, maka BPTP Aceh mempunyai fungsi untuk melaksanakan:

- a. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna

- spesifik lokasi;
- b. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - c. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
 - d. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - e. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
 - f. Urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraikan di atas, BPTP Aceh juga mendapatkan mandat sebagai Sekretariat Pengelolaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang tingkat Wilayah (UAPPA-BW) yang mengkoordinir pelaporan penggunaan anggaran/barang lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Aceh.

Selain berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 tahun 2013, BPTP Aceh juga mendapatkan mandat untuk melaksanakan penugasan langsung dari Menteri Pertanian, berupa kegiatan on-top mendukung pencapaian kedaulatan pangan bangsa. Penugasan on-top tersebut mencakup kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian, Pembibitan Ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian (KUB) dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ayam Kampung Unggul (KUB) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan. yang secara periodik harus melakukan pelaporan kepada BBP2TP Bogor, sebagai atasan langsung BPTP Aceh.

Struktur Organisasi BPTP Aceh (Lampiran 1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Balai: Ir. M. Ferizal, M.Sc.
- b. Kasubbag Tata Usaha: Fauzie Nasri, S.ST

- c. Sub Koordinator Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian: Rizki Ardiansyah, S.P., M.Si
- d. Koordinator Program dan Evaluasi: Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
- e. Kelompok Jabatan Fungsional: Peneliti, Penyuluh dan Litkayasa

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian dan diseminasi oleh BPTP Aceh tahun 2022 disesuaikan dengan rencana strategis, visi dan misi Badan Litbang Pertanian yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Pertanian yang termaktub dalam Rencana Strategis Balitbangtan 2020-2024.

2.1. Visi

Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan.

2.2. Misi

1. Menghasilkan teknologi dan inovasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan *scientific recognition* dan *impact recognition*.
3. Mewujudkan institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel

2.3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTP Aceh diarahkan untuk menggerakkan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat informasi teknologi pertanian serta bersama-sama dengan instansi lain di daerah menghasilkan, menyiapkan dan menyampaikan paket teknologi pertanian kepada para pengguna (petani, pengusaha/swasta, praktisi, ilmuwan dan para pengambil kebijakan) untuk digunakan dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Aceh.

Sesuai dengan mandatnya, maka tujuan kegiatan yang dilaksanakan di BPTP Aceh adalah:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis *advanced technology* dan *bioscience*, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika iklim.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional.

b) Sasaran

Sasaran kegiatan yang akan dicapai oleh BPTP Aceh adalah :

1. Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru, adaptif dan berdaya saing dengan memanfaatkan *Advanced Technology* dan *bioscience*.
2. Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis *bioscience* dan *bioengineering* dengan memanfaatkan *advanced technology*, seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing yang adaptif.
3. Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spasial dengan dukungan IT.
4. Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
5. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi.
6. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan HKI.

c) Dinamika Lingkungan Strategis Dalam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Perubahan paradigma dan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dalam rentang waktu 2020 – 2024, akan terus berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya institusi dan stakeholder di daerah. Dengan demikian, diperlukan strategi khusus agar kiprah dan eksistensi BPTP Aceh dapat terwujud secara nyata. Strategi tersebut digambarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah dan fokus

untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya. Harapannya, kegiatan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghasilkan produk-produk teknologi yang inovatif, sesuai kebutuhan pengguna dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi spesifik lokasi 2020-2024 harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pertanian Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam SIPP 2015-2045, serta arah kebijakan litbang pertanian. Berdasarkan kebijakan litbang pertanian untuk pengembangan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bio-industri, maka arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi adalah mengembangkan sistem pengkajian dan diseminasi mendukung pertanian bioindustri berbasis sumberdaya lokal, sesuai dengan **Program Badan Litbang Pertanian 2020-2024: Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan**.

Secara rinci program penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan dinyatakan dengan sasaran strategis yaitu:

1. Tersedianya inovasi pertanian spesifik lokasi mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan
2. Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi, serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
3. Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi
4. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi
5. Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

2.4. Kegiatan

Dukungan Badan Litbang dan BBP2TP terhadap target pencapaian sukses Kementerian Pertanian ditunjukkan dalam sasaran strategis, yang diantaranya berkaitan langsung dengan Tupoksi BPTP Aceh, yakni menghasilkan inovasi

teknologi spesifik lokasi, meningkatkan sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta membangun jejaring kerjasama antar daerah dan nasional. Sejak berdirinya BPTP sesuai dengan Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, tugas utama BPTP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dinamika terkini yang berhubungan dengan Tupoksi BPTP adalah tentang tata kerja BPTP, adanya penugasan bagi penyuluh di BPTP untuk membantu penyuluh di daerah dalam mempersiapkan materi teknis penyuluhan.

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BPTP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BPTP Aceh sebagai penghasil teknologi tepat guna spesifik lokasi secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan. Dalam melaksanakan kegiatannya mendukung program utama Badan Litbang 2015 yaitu Penciptaan Varietas Unggul Berdaya Saing, maka Indikator Kinerja Utama BPTP Aceh yaitu: 1). Teknologi pertanian spesifik Lokasi; 2). Teknologi yang didiseminasikan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Litbang Pertanian dan BBP2TP, BPTP Aceh melaksanakan kegiatan pengkajian spesifik lokasi dilakukan di 23 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh serta rekomendasi kebijakan spesifik lokasi merupakan implementasi hasil koordinasi dengan stakeholder terkait kebutuhan teknologi di daerah. Adapun kegiatan diseminasi meliputi kegiatan *top down* yang mendukung kinerja Kementerian Pertanian seperti program pendampingan TTP dan Tagrimart serta kegiatan diseminasi *in-house* seperti visitor plot serta kegiatan diseminasi dengan memanfaatkan kebun percobaan.

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2022, BPTP Aceh mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) BPTP Aceh tahun 2022. Kegiatan utama BPTP Aceh pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi BPTP Aceh Tahun 2022

Kode	Judul Kegiatan Tahun 2022
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1801	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
1801.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk
1809	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian
1809.EAA	Layanan Perkantoran
1809.EAB	Layanan Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
1809.EAC	Layanan Umum
1809.EAD	Layanan Sarana Internal
1809.EAE	Layanan Prasarana Internal
1809.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja kegiatan penelitian diselaraskan dengan sasaran Renstra BPTP Aceh 2020 – 2024. BPTP Aceh setiap tahun telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) 2022 (Lampiran 2) yang berisi: 1) Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan; 2) Indikator kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; dan 3) Target yang akan dihasilkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPTP Aceh Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	24
		2. Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100
2	Terwujud kan Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (Nilai)	75
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

Pada Tahun 2022 BPTP Aceh untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, jumlah alokasi anggaran pada DIPA BPTP Aceh sampai dengan bulan Desember telah mengalami tujuh kali revisi, yang semula sebesar Rp. 14.109.942.000,- setelah revisi ketujuh yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 8.559.474.000,-. tersebut terdiri dari: 1) Belanja Pegawai Rp. 5.709.501.000; 2) Belanja operasional perkantoran Rp. 1.598.000.000; 3) Barang non operasional Rp. 1.131.973.000,- dan 4) Belanja Modal Rp. 150.000.000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Anggaran BPTP Aceh Tahun 2022

Kondisi Revisi Anggaran	Tanggal DIPA
Dipa Anggaran Tahun Anggaran 2022	17 November 2021
Revisi I: Blokir alokasi anggaran harus dilengkapi dasar hukum pengalokasi dan/atau dokumen terkait (kekurangan dokumen pendukung) pada kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian	17 Mei 2022
Revisi II: Revisi Penarikan Dana (Halaman III DIPA)	03 Juni 2022
Revisi III:	07 Juli 2022

Blokir <i>Automatic Adjustment</i> dan Revisi Penarikan Dana (Halaman III DIPA)	
Revisi IV: Revisi POK dan Penarikan Dana (Halaman III DIPA)	27 September 2022
Revisi V: Revisi penghapusan alokasi anggaran pada kegiatan Diseminasi Teknologi Pertanian dan blokir belanja ASN reintegrasi ke BRIN	14 Oktober 2022
Revisi VI: Revisi optimalisasi belanja mengikat ke belanja operasional kantor	10 November 2022
Revisi VII: Revisi pengurangan target dan pemanfaatan PNB	02 Desember 2022

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, alokasi anggaran BPTP Aceh berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2022

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	%
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	469.365.000	100,00
1801	<i>Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian</i>	469.365.000	100,00
1801.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	469.365.000	100,00
1801.DDA.504	Benih Padi	427.365.000	91,05
1801.DDA.505	Benih Tanaman Pangan Lainnya	20.000.000	4,26
1801.DDA.506	Benih Jagung	22.000.000	4,69
WA	Program Dukungan Manajemen	8.130.109.000	100,00
1809	<i>Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian</i>	8.130.109.000	100,00
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.499.938.000	92,25
1809.EBA.956	Layanan BMN	95.237.000	1,27
1809.EBA.962	Layanan Umum	87.200.000	18,57
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.317.501.000	97,57
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	150.000.000	2,05
1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	292.571.000	4,00
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	66.800.000	0,91
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	120.800.000	1,65

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Pada tahun anggaran 2022, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disesuaikan dengan Renstra 2020-2024, BPTP Aceh telah menetapkan dua sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1) Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi, dan (2) Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Aceh. Selanjutnya, kedua sasaran tersebut diukur dengan empat indikator kinerja output berupa: (1) Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir), (2) Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%), (3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian Aceh (Nilai), dan (4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai). Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPTP Aceh, capaian indikator kinerja kegiatan utama BPTP Aceh tahun 2022 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BPTP Aceh Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (100%)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	24	24	100
		2. Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100	100	100
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (Nilai)	75	89	119
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90	97	107

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator kinerja BPTP Aceh tahun 2022 mencapai >100% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (1) **sangat berhasil** jika capaian >100%;

(2) **berhasil** jika capaian 80-100%; (3) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (4) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Berdasarkan Tabel 5, secara umum capaian kinerja untuk sasaran BPTP Aceh masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai >100%. Indikator kinerja Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi yang mencapai target 100%. Sedangkan indikator kinerja Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas mencapai target >100%. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPTP Aceh tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi

Sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian terdiri dari indikator kinerja: (1) jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir), dan (2) rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	Paket Teknologi	24	24	100
Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	%	100	100	100

Berdasarkan Tabel 6, untuk mengukur capaian sasaran tersebut, diukur dengan tiga indikator kinerja sasaran. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPTP Aceh berhasil memperoleh 24 jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan dari 24 paket teknologi yang ditargetkan (100%), memiliki 100%

rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian yang dilakukan dari yang ditargetkan (100%). Capaian masing-masing indikator dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)

Sampai dengan tahun 2022, telah tercapai 24 paket teknologi dari target 24 paket teknologi yang dimanfaatkan (100%). Capaian ini merupakan akumulasi paket teknologi yang dimanfaatkan pada tahun 2014 – 2022 (Tabel 7).

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Paket Teknologi yang Dimanfaatkan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	Paket Teknologi	24	24	100

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan kesesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan setempat. Sedangkan teknologi yang didiseminasikan adalah hasil pengkajian yang disebarluaskan melalui berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena BPTP Aceh merupakan unit kerja yang memiliki tugas melakukan pengkajian dan diseminasi langsung pada pengguna, maka teknologi yang didiseminasikan sekaligus merupakan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbagai paket teknologi spesifik lokasi yang telah dimanfaatkan oleh petani, masyarakat umum, dan pemerintah daerah, menjadi pendorong perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian.

Nilai capaian kinerja indikator 100% ini diperoleh dari banyaknya teknologi yang dimanfaatkan sebagai dampak dari kegiatan diseminasi yang secara masif dilakukan BPTP Aceh selama ini. Hal ini terjadi mengingat diseminasi teknologi Kementerian Pertanian pada umumnya, dan teknologi Balitbangtan pada khususnya ikut mengakselerasi pemanfaatan teknologi pertanian yang sudah

berada pada level Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*technology readiness*) yang masuk klasifikasi siap didiseminasi.

Dukungan Badan Litbang dan BBP2TP terhadap target pencapaian sukses Kementerian Pertanian ditunjukkan dalam sasaran strategis, yang diantaranya berkaitan langsung dengan Tupoksi BPTP Aceh, yakni menghasilkan inovasi teknologi pesifik lokasi, meningkatkan sistem diseminasi, promosi dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, serta membangun jejaring kerjasama antar daerah dan nasional. Sejak berdirinya BPTP sesuai dengan Permentan Nomor: 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP, tugas utama BPTP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, dan adanya penugasan bagi penyuluh di BPTP untuk membantu penyuluh didaerah dalam mempersiapkan materi teknis penyuluhan.

Perkembangan terkini yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan peran BPTP dalam pembangunan pertanian daerah adalah semakin meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kemajuan pembangunan pertanian di wilayah masing-masing seiring dengan program otonomi dan pemekaran daerah. BPTP Aceh sebagai penghasil teknologi tepat guna spesifik lokasi secara nyata telah banyak diakui keunggulannya. Hal ini memberi peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang makin intensif dengan pemda dan stakeholder lain yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Indikator Kinerja 2:
Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)

Indikator kinerja kedua yang ditargetkan pada tahun 2022 telah tercapai 100%, termasuk kategori **berhasil** (Tabel 8). Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan merupakan indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian.

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Rasio Paket Teknologi Pertanian yang Dihasilkan Terhadap Pengkajian Teknologi Pertanian yang Dilakukan Pada Tahun Berjalan Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Persentase hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	%	100	100	100

Teknologi pertanian spesifik lokasi adalah suatu hasil kegiatan pengkajian yang memenuhi kesesuaian lahan dan agroklimat setempat dan mempunyai potensi untuk diuji lebih lanjut menjadi paket teknologi pertanian wilayah. Di antara teknologi pertanian spesifik lokasi tersebut ada yang berpotensi untuk menjadi teknologi pertanian unggulan. Sedangkan pengkajian teknologi pertanian adalah kegiatan pengujian kesesuaian komponen teknologi pertanian pada berbagai kondisi lahan dan agroklimat untuk menghasilkan teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi.

Sasaran 2
Terwujudkan Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian terdiri dari indikator kinerja: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh.

Indikator Kinerja 1:
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (Nilai)

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah salah satu ukuran untuk predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian kinerja indikator dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (Nilai)	Nilai	75	89,07	119

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN RB No 14 tahun 2017, nilai IKM rata-rata BPTP Aceh pada tahun 2022 sebesar 89,07 berada pada interval konversi mutu pelayanan 88,31 – 100,00. Artinya mutu pelayanan kinerja berada pada kategori A atau kinerja unit pelayanan BPTP Aceh dinilai Baik. Mengacu pada target indikator kinerja, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan layanan publik BPTP Aceh telah melampaui target, karena telah tercapai nilai sebesar 89,07 (119%), sehingga termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Ruang lingkup pengukuran Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan layanan publik kepuasan masyarakat ini meliputi Sembilan unsur yakni persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Pada tahun 2022, BPTP Aceh menerapkan sistem survey online pada penilaian kepuasan masyarakat pada website ikm.pertanian.go.id. dan telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kriteria pengukuran yang berbeda yaitu dengan mengukur 9 unsur pelayanan.

Sasaran 3
Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran dimanfaatkannya anggaran Badan Penelitian dan pengembangan pertanian yang akuntabel dan berkualitas terdiri dari indikator kinerja: Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh.

Indikator Kinerja 1:
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (berdasarkan regulasi yang berlaku)

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan serta pencapaian keluaran yang diukur berdasarkan indikator regulasi sesuai PP 90/2010 terkait: (1) Penyerapan anggaran, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) Pencapaian keluaran, dan (4) Efisiensi. Dengan tingginya realisasi anggaran yang dicapai dan capaian target kinerja, nilai kinerja anggaran BPTP Aceh secara terukur mencapai >100% (Sangat Baik). Capaian kinerja indikator dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	Nilai	90	97	107

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Aceh Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 -2024

Jika membandingkan dengan target tahun 2022 yang terdapat pada Renstra tahun 2020–2024, secara umum capaian kinerja BPTP Aceh tahun 2022 melampaui target (>100%). Indikator yang mencapai target sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan capaian 100% yaitu: (1) Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) sebanyak 24 paket teknologi, (2) Rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan mencapai 100%. Sedangkan indikator yang melampaui target pada (3) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh mencapai nilai 89 serta (4) Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh mencapai nilai 97. Dengan Renstra 2020 – 2024 dan penyempurnaan IKU, sehingga untuk perbandingan nilai capaian selama tahun 2020–2024 dengan target Renstra tahun 2020–2024, hanya dapat dilakukan pada satu tahun terakhir.

3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Pandemi Covid 19 yang masih terjadi dan transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di tahun anggaran 2022 sangat mempengaruhi kinerja BPTP Aceh dalam mencapai beberapa target kegiatan, meskipun pada akhirnya target volume capaian yang direvisi sesuai dengan *refocusing* anggaran yang disediakan.

Keberhasilan

Pada tahun 2022, sasaran pertama tersedianya teknologi pertanian unggulan spesifik lokasi mencapai 100%. Sasaran kedua yaitu meningkatnya penyebarluasan (diseminasi) sebesar 100% sedangkan sasaran ketiga meningkatnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian mencapai 100% dan sasaran keempat meningkatnya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian dengan rata-rata seluruh capaian sebesar 100%. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh secara umum menunjukkan keberhasilan sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Kendala

Namun demikian harus diakui masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai dengan sempurna, yakni peningkatan mutu SDM. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 masih ditemui beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPTP Aceh dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan BPTP Aceh tentunya memiliki keterbatasan terutama sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia dan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan diseminasi. Hal inilah yang banyak mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran. Selama tahun 2022 keberhasilan yang dicapai oleh BPTP Aceh antara lain disebabkan oleh: (1) Kesiapan

dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu; (2) Intensifnya kegiatan pertemuan masing-masing tim penanggungjawab; dan (3) Sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar internal kegiatan dan pertemuan lainnya.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi pelaksanaan kegiatan BPTP Aceh, harus : (1) Melakukan akselerasi inovasi teknologi pertanian agar terdesiminasikan ke pengguna (*End User*); (2) Melakukan padu padan transfer pengetahuan inovasi teknologi yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang pengkajian dan pengembangan, BPTP Aceh didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) yang tertuang dalam DIPA BPTP Aceh Tahun 2022.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Anggaran BPTP Aceh dialokasikan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567392/2022, tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 14.109.942.000,-. Setelah mengalami beberapa kali revisi DIPA selama tahun berjalan, dikarenakan adanya kebijakan penganggaran berupa penambahan dan penyesuaian anggaran, maka jumlah Pagu DIPA Revisi Tahun 2022 terakhir sebesar Rp. 8.599.474.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran BPTP Aceh, adapun jenis belanja (menurut DIPA tahun 2022) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan

belanja modal. Realisasi anggaran BPTP Aceh per 31 Desember 2022 berdasarkan data PMK 249/2011 dan E-Monev Bappenas sebesar Rp. 8.417.742.432,- (97,88%) sedangkan total sisa anggaran sebesar Rp. 181.749.432,- (2,12%). Secara lebih rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BPTP Aceh Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	%
1.	Pegawai	5.719.501.000	5.584.802.175	134.698.825	97,64
2.	Barang Operasional	1.598.000.000	1.554.750.476	43.249.524	97,29
3.	Barang Non Operasional	1.131.973.000	1.128.291.781	3.681.219	99,67
4.	Modal	150.000.000	149.880.000	120.000	99,92
	Jumlah	8.599.474.000	8.417.724.432	181.749.568	97,88

Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Realisasi belanja tersebut digunakan untuk keperluan belanja pegawai (gaji PNS), belanja barang (kegiatan kantor) dan belanja modal (pengadaan alat/barang modal). Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan. Secara rinci realisasi per output dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2022

Kode	Output Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	469.365.000	468.473.900	99,81
1801	<i>Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian</i>	469.365.000	468.473.900	99,81
1801.DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	469.365.000	468.473.900	99,81
1801.DDA.504	Benih Padi	427.365.000	426.703.300	99,85
1801.DDA.505	Benih Tanaman Pangan Lainnya	20.000.000	19.834.200	99,17
1801.DDA.506	Benih Jagung	22.000.000	21.936.400	99,71
WA	Program Dukungan Manajemen	8.130.109.000	7.949.021.132	97,77
1809	<i>Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian</i>	8.130.109.000	7.949.021.132	97,77
1809.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.499.938.000	7.948.976.132	105,99
1809.EBA.956	Layanan BMN	95.237.000	93.238.750	97,90
1809.EBA.962	Layanan Umum	87.200.000	86.760.000	99,50
1809.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.317.501.000	7.139.552.651	97,57
1809.EBB.951	Layanan Sarana Internal	150.000.000	149.880.000	99,92
1809.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	292.571.000	292.336.598	99,92
1809.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	66.800.000	66.764.000	99,95
1809.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	120.800.000	120.444.133	99,71

3.2.2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh BPTP Aceh pada tahun 2022 diperoleh dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Estimasi PNBP yang dialokasikan pada BPTP Aceh sesuai DIPA revisi terakhir tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 136.500.000,-. Potensi estimasi PNBP diperoleh dari Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang, Pendapatan dari Pemanfaatan BMN, dan Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi. Total realisasi PNBP Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 241.212.574,- (176,71%). Realisasi PNBP berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (47,33%), Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (44,46%), Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (8,13%) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (0,08%). Penggunaan PNBП juga telah dilaksanakan sesuai dengan naskah dokumen perencanaan dan batas maksimal penggunaan PNBП tersebut yaitu 88% dari nilai pagu estimasi penerimaan PNBП pada tahun anggaran 2022. Secara rinci besarnya PNBП BPTP Aceh tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPTP Aceh Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	95.250.000	114.175.000	119,87
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	107.250.979	0,00
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	21.600.000	19.601.530	90,75
4	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.050.000	0	0,00
5	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	18.600.000	0	0,70
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185.065	0,00
Total		136.500.000	241.212.574	176,71

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh Tahun 2022 telah dicapai dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPTP Aceh juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal yang dihadapi oleh BPTP Aceh terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki, baik dari sisi kualifikasi maupun bidang keahlian. Selain itu, transformasi kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempengaruhi perimbangan komposisi tenaga fungsional belum sesuai kebutuhan. Sedangkan hambatan/kendala eksternal yang dihadapi BPTP Aceh berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan. Capaian kinerja yang dicapai pada tahun 2022 berupa :

1. Indikator kinerja yang dapat mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian 100 persen (berhasil) adalah rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan, nilai pembangunan wilayah Zona Integrasi (ZI) dan nilai kinerja anggaran BPTP Aceh.
2. Nilai capaian tahun 2022 menunjukkan terpenuhinya target yang telah ditetapkan yaitu jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) dan jumlah rasio paket teknologi pertanian yang dihasilkan, nilai pembangunan wilayah Zona Integrasi (ZI) dan nilai kinerja anggaran BPTP Aceh sesuai target (100%).

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja BPTP Aceh ke depan masih diperlukan, langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan diseminasi adalah:

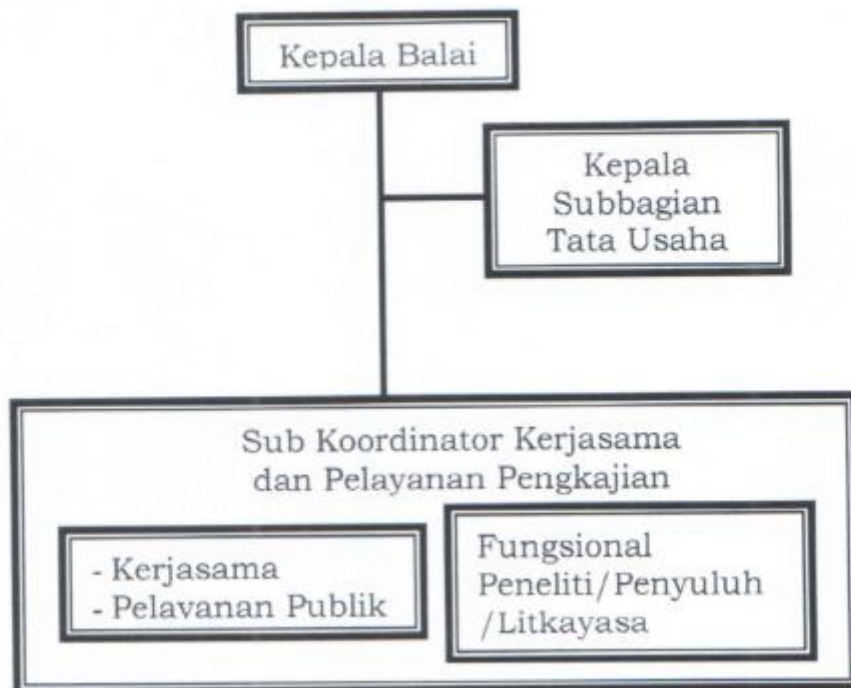
1. Melakukan akselerasi inovasi teknologi pertanian agar terdiseminasikan ke pengguna (*End User*).

2. Melakukan padu padan transfer pengetahuan inovasi teknologi yang ada di BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum memadai.

V. LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi, Personalia, dan Tata Kelola BPTP Aceh Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh Nomor: B-01/OT.220/H.12.I/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) BPTP Aceh Tahun 2022

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH Jl. Panglima Nyak Makam No. 27, Lampineung - Banda Aceh 23125 Telepon : (0651) 7551811, Fax : (0651) 7552077, Email : btp_aceh@yahoo.co.id btp-aceh@libang.pertanian.go.id, Website : www.nad.libang.pertanian.go.id 	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama :	M. Ferizal
Jabatan :	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama :	Fadjry Djufry
Jabatan :	PtL Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Banda Aceh, 17 Desember 2022	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	 M. Ferizal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN ACEH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (Jumlah)	24
		2. Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100
2	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (Nilai)	75
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
Program Riset dan Inovasi IPTEK		
Kegiatan:		
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp	469.365.000
Program Dukungan Manajemen		
Kegiatan:		
Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	8.130.109.000

Banda Aceh, 17 Desember 2022

Pt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh

Fadry Dufry



M. Ferizal

Lampiran 3. Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih BPTP Aceh Tahun 2022

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR : 1409/Kpts/PW.410/H/08/2022

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian, perlu dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan hasil penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 124/Kpts/RC.010/H/01/2022 tentang Panduan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2022, sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Realisasi
1	BB Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	94,97
2	BPTP Riau	94,42
3	BPTP Sumatera Utara	93,62
4	Balai Penelitian Lingkungan Pertanian	92,33

5	BPTP Maluku Utara	92,24
6	Loka Penelitian Sapi Potong	92,01
7	Balai Penelitian Tanah	91,03
8	BPTP Papua	90,69
9	Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan	89,91
10	Balai Besar Penelitian Veteriner	89,74
11	Loka Penelitian Kambing Potong	89,51
12	BPTP Nangroe Aceh Darusalam	89,07
13	Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian	88,89
14	BPTP Banten	88,77
15	Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian	88,47
16	Balai Penelitian Lahan Rawa	88,25
17	BPTP Sumatera Barat	88,02
18	BPTP Bengkulu	87,76
19	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	87,48
20	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	87,42
21	Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi	87,37
22	Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian	86,51
23	BPTP Sulawesi Tenggara	86,51
24	Balai Besar Pasca Panen Pertanian	86,41
25	BPTP Maluku	85,97
26	Loka Penelitian Penyakit Tungro	85,53
27	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	85,25
28	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	84,87
29	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	84,84
30	Balai Penelitian Tanaman Industri	84,67
31	Balai Penelitian Ternak	84,58
32	BPTP Gorontalo	84,49
33	Sekretariat Badan Litbang Pertanian	84,22
34	BPTP Kalimantan Tengah	84,11
35	BPTP Jambi	83,93
36	Balai Penelitian Tanaman Palma	83,91
37	BPTP Bali	83,57
38	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Subtropika	83,54
39	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian	83,26
40	BPTP Jawa Barat	83,25
41	Balai Penelitian Tanaman Serealia	83,01

42	BPTP NTT	82,71
43	BPTP DKI Jakarta	82,61
44	BPTP Kepulauan Riau	82,55
45	BPTP Jawa Tengah	82,44
46	BPTP Bangka Belitung	82,38
47	BPTP Yogyakarta	81,95
48	BPTP Kalimantan Timur	81,69
49	BPTP Lampung	81,16
50	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	80,93
51	BPTP Sulawesi Barat	80,54
52	BPTP Sulawesi Tengah	80,51
53	BPTP Kalimantan Barat	80,48
54	BPTP Sumatera Selatan	80,17
55	BPTP Kalimantan Selatan	80,09
56	BPTP Papua Barat	79,98
57	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika	78,74
58	BPTP Sulawesi Selatan	78,23
59	BPTP Jawa Timur	75,64
60	BPTP Sulawesi Utara	75,02
61	Balai Penelitian Tanaman Hias	73,99

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022
PLT. KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN,



EADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan BPTP Aceh Tahun 2022

	Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH, Melaksanakan Panen Dan Launching Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi di Kabupaten Aceh Besar
	Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Kunjungan Kerja (kunker) ke Provinsi Aceh, Komisi IV DPR-RI mengunjungi BPTP Aceh yang merupakan lembaga vertikal di bawah Kementerian Pertanian
	Kunjungan Kerja Kepala Badan Litbang Pertanian Kunjungan Ka Badan didampingi Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)

 Tuesday, 22 February 2022 N 5° 28' 2.341", E 95° 22' 24.719" 21° N 2337.1 Aceh Besar	Diseminasi BIMTEK Pengembangan Pertanian Berbasis Korporasi Syariah di Kabupaten Aceh Besar oleh BPTP Aceh
 27 Sep 2022 09:40:35 4°43'16.499" N 96°51'25.099" E 23° E RJ, Bate Atu, Kec. Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582, Indonesia Bimtek Berbasis Kopi Arabika Gayo di Provinsi Aceh	Diseminasi BIMTEK Bimbingan Teknis kepada Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dan Petani kopi serta staf bidang perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah
 Bimbingan Teknis, Berbasis Kopi Arabika Gayo 4°44'56", 96°53'54", 1430.1m, 348° 20 Okt 2022 14:37:40	Diseminasi BIMTEK Bimbingan Teknis kepada Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dan Petani kopi serta staf bidang perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah
 Wednesday, 11 May 2022 N 5° 27' 47.306", E 95° 22' 56.547" 255° W Reuhat Tuha Kabupaten Aceh Besar Monitoring dan Evaluasi Penanganan PMK pada ternak sapi	Pencegahan Penyebaran Virus PMK BPTP Aceh Berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh, Dinas Pertanian Aceh Besar, Kepolisian Resort Aceh Besar, dan Muspika Setempat Bersama-sama melakukan Pemantauan dan Sosialisasi PMK

	Perbenihan BPTP Aceh melalui Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), Rakit Benih Jagung Hibrida Secara Mandiri
	Kerjasama MoU BPTP Aceh Menjalin Kerjasama dengan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



Alamat : Jl. T. P Nyak Makam No. 27 Banda Aceh Telp. 0651-7551811, Fax. 0651-7552077

Email : bptp_aceh@litbang.pertanian.go.id; bptp-aceh@yahoo.co.id



: @acehbptp



: @bptpaceh



: @bptpaceh



: @BPTPAceh

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS
www.nad.litbang.pertanian.go.id

